

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB KOPERASI PEGAWAI NEGERI
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG TERHADAP
ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FRANKY LEODA
02140141

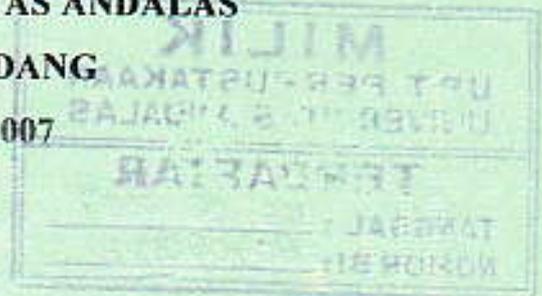
**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No.Reg.2306/PK II/03/2007



TANGGUNG JAWAB KOPERASI PEGAWAI NEGERI RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG TERHADAP ANGGOTA DAN
PIHAK KETIGA

(Franky Leoda,02140141, Fakultas Hukum,Unand,212)

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai suatu badan hukum, segala kegiatan yang ada didalamnya diatur dalam satu tatanan, menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum terhadap semua pihak yang terlibat didalamnya. Tanggung jawab Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang akan dipaparkan dalam skripsi ini dengan judul "Tanggung Jawab Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Terhadap Anggota dan Pihak Ketiga"

Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan mengenai apa saja bentuk kegiatan Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, bagaimana tanggung jawab pengurus terhadap Anggota dan pihak ketiga serta hambatan yang ditemui pengurus dalam mengelola usaha koperasi serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam kenyataan yang terjadi di lapangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dimana Penulis memilih secara langsung pihak yang akan dijadikan sampel.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk kegiatan koperasi Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang terdiri dari penyediaan barang dan jasa kepada anggota yang terdiri dari beberapa divisi usaha. Tanggung jawab pengurus meliputi tanggung jawab terhadap anggota dituangkan dalam anggaran dasar dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan kerja sama koperasi dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam menjalankan usaha pengurus Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang menemui beberapa hambatan yaitu kurangnya pengetahuan anggota terhadap koperasi, kurangnya maksimalnya keterampilan dan keahlian pengurus dalam mengelola usaha koperasi, rendahnya partisipasi anggota untuk memanfaatkan divisi-divisi usaha koperasi dan keterlambatan dalam hal pengembalian kredit.

BAB I P ENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara yang senantiasa menjaga keseimbangan antara hukum dan kesejahteraan karena keduanya saling mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Dimana, kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa tegaknya hukum dan sebaliknya hukum pun tidak bisa ditegakkan apabila kesejahteraan masyarakatnya tidak diperhatikan. Sehingga diperlukan suatu keseimbangan antara hukum dan kesejahteraan untuk mendorong kemajuan negara.

Pembangunan perekonomian nasional Indonesia pun diarahkan pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil, dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan.

Dalam kaitannya dengan tujuan tersebut maka pembangunan koperasi haruslah diarahkan agar dapat berperan secara positif sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai hukum positif Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Sebagai bagian integral dari perekonomian nasional yang juga sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat, pengembangan dan pembangunan koperasi senantiasa diarahkan untuk kemajuan dan kemandirian para anggotanya. Disamping itu hendaknya koperasi menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan disegala bidang usaha, terutama dalam bidang kehidupan perekonomian rakyat dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya, semua koperasi dapat dimanfaatkan secara efisien dan tepat guna. Hal ini pada akhirnya juga akan memegang peranan penting dalam pengembangan dan pemulihan ekonomi bangsa. Untuk itu juga diperlukan pengelolaan koperasi yang baik dan efektif sehingga cita-cita bangsa sebagaimana yang dirumuskan undang-undang itu dapat terwujud.

Agar dapat berjalan dengan tepat guna, sangat penting kiranya untuk mengembangkan, melindungi dan memelihara koperasi dari segala akses negatif. Hendaknya koperasi dapat dijadikan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat sehingga mampu menjadi pemeran utama dalam menciptakan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat baik.

Melihat pentingnya peranan koperasi tersebut, berbagai instansi baik swasta maupun pemerintahan mendirikan koperasi guna mensejahterakan para karyawannya. Salah satunya adalah Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang selanjutnya disebut KPN RSUP Dr.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

M. Djamil Padang yang beranggotakan seluruh pegawai di lingkungan Perjan RSUP Dr. M Djamil Padang .

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk membahas masalah tentang koperasi yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"TANGGUNGJAWAB KOPERASI PEGAWAI NEGERI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL PADANG TERHADAP ANGGOTA DAN PIHAK KETIGA"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kegiatan Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai badan hukum?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang sebagai suatu badan hukum kepada anggota dan pihak ke-3?
3. Hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam penyelesaian masalah tanggungjawab pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Dr. M. Djamil Padang serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam upaya meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, serta diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam bidang perkoperasian baik bagi penulis

maupun bagi pihak lainnya. Disamping itu secara khusus, tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai badan hukum;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang sebagai badan hukum kepada anggota dan pihak ketiga;
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui pengurus dalam penyelesaian masalah tanggungjawab pada KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan terhadap perkembangan mata kuliah hukum koperasi pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait baik instansi pemerintahan maupun pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan bentuk usaha koperasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang yang telah digambarkan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, ada 2 bentuk kegiatan yang dilakukan dalam KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu penyediaan barang kebutuhan anggota dan pelayanan jasa. Kegiatan penyediaan/penjualan barang terdiri dari divisi usaha toko dan fotocopy dan divisi usaha kafetaria dan kafe tenda. Kegiatan pelayanan jasa terdiri dari atas divisi usaha simpan pinjam, divisi usaha wartel, divisi usaha rekanan. Dalam menjalankan usaha tersebut KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Dalam menjalankan kegiatannya, KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang yang diwakili pengurus koperasi pegawai negeri memiliki tanggung jawab terhadap anggota dan pihak ketiga. Tanggung jawab terhadap anggota mencakup pengelolaan dan pengembangan kegiatan usaha organisasi koperasi yang bertujuan kesejahteraan anggota serta tanggung jawab terhadap setiap keputusan dan ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan rapat anggota tahunan. Sedangkan tanggung jawab pengurus pelaksanaan terhadap pihak ketiga mencakup pelaksanaan kesepakatan kerja sama antara koperasi dan pihak ketiga serta

pertanggungjawaban atas semua pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut.

3. Hambatan yang ditemui pengurus dalam mengelola dan mengembangkan KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota dalam berkoperasi, kurang maksimalnya keterampilan dan keahlian pengurus dalam menjalankan usaha koperasi, kurangnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan suatu divisi usaha dan sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian kredit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengurus KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap anggota mengenai perkoperasian dalam bentuk pelatihan, diklat dan study tour untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus. Disamping itu juga diberikan diskon-diskon terhadap produk barang yang dijual KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang dan penenaan sanksi terhadap anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian yang penulis lakukan di KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang, ada beberapa saran sehubungan dengan masalah yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi hendaknya banyak melibatkan keikutsertaan anggota secara aktif serta menitikberatkan kegiatan pada

kebutuhan-kebutuhan pokok anggota sehingga memaksimalkan pemanfaatan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

2. Mengenai tanggung jawab KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang terhadap pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang hendaknya dituangkan dalam suatu ketentuan tertulis agar diketahui oleh setiap perangkat organisasi dan memberikan gambaran yang tegas mengenai tanggung jawab KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Mengenai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diadakan pengurus baik terhadap anggota maupun untuk menambah wawasan dan keterampilan pengurus hendaknya terus dilakukan secara berkala karena hal ini akan memberikan manfaat yang sangat besar terhadap keberadaan dan tumbuh kembang KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 1997
- Chaidir Ali. *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1991.
- Fahmi Idrus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Greisinda Press, Surabaya, 2004.
- Hardijan Rusli. *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Kajian Analisis Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Hendrojogi. *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint, Divisi dari kesaint Blanc, Jakarta, Indonesia : 2003,
- Laporan Tahunan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang, Tahun 2002,2003, 2004.*
- M. Natzir Said. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Indonesia Ditinjau dari segi Hukum Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1985